

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, 27 Nopember 2017

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HARTONO, S.H.
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 93685
4. Tanggal Pelaporan : 30 April 2012, 14 April 2015

Status Laporan**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 150 m2 & 150 m2, di Kabupaten DEMAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1997
2. Tanah seluas 170 m2 , di Kota MAGELANG, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2009

B. HARTA BERGERAK**a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA**

1. Motor, merk YAMAHA MIO, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2007

		Status Laporan	
		30 April 2012	14 April 2015
Rp.	210.650.000	Rp.	210.650.000
Rp.	160.650.000	Rp.	160.650.000
Rp.	50.000.000	Rp.	50.000.000
Rp.	89.000.000	Rp.	119.000.000
Rp.	10.000.000	Rp.	10.000.000

	30 April 2012		14 April 2015	
2. Motor, merk YAMAHA MIO SOUL, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp.	14.000.000	Rp.	14.000.000
3. Mobil, merk SUZUKI, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun --- (Penambahan Data Baru)		----	Rp.	95.000.000
4. Mobil, merk KIA VISTO, tahun pembuatan 2003, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun --- (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp.	65.000.000		----
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		----		----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA		----		----
C. SURAT BERHARGA	Rp.	0	Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp.	65.000.000	Rp.	71.781.787
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan)	Rp.	65.000.000	Rp.	71.781.787
E. PIUTANG	Rp.	0	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	364.650.000	Rp.	401.431.787
III. HUTANG		----		----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	364.650.000	Rp.	401.431.787

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

